BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang kualitas pendidikan tentu saja tidak bisa dilepaskan pada kualitas kurikulum, baik kualitas hasil dan kualitas proses (Ibrahim, 1980b; Sukmadinata, 1983a). Untuk mengetahui kualitas suatu hasil pendidikan, seorang peneliti di bidang tersebut akan melihat kualitas proses, diiringi dengan perencanaan suatu kurikulum juga. Demikian juga sebaliknya, untuk mengetahui suatu kualitas proses atau implementasi kurikulum, dapat dilihat dari hasil atau outcome yang ditunjukkan. Oliva dan Gordon (2013) memperkuat dengan pernyataan kurikulum merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan, atau yang dikenal dengan jantung pendidikan (heart of education). Dalam hal ini, pendidikan, sebagaimana kurikulum sebagai jantung pendidikan harus mampu menciptakan manusia yang sehat raganya dan bahagia jiwanya (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013; Winton, 2013). Disini terlihat bahwa peran pendidikan yang esensial untuk memberi bekal kehidupan melalui kemampuan dan nilai-nilai sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Dalam hal ini, manusia sebagai sasaran dari pendidikan. Esensi pendidikan memiliki peran untuk mempercepat seseorang memahami apa yang ingin diketahui atau dipelajari (Yuliani & Hartanto, 2016). Hal ini berbeda dengan individu yang tidak mendapatkan pendidikan, karena melalui pendidikan terdapat proses belajar dari dalam diri individu. Dengan begitu, topik pendidikan tidak pernah lepas membahas kurikulum sebagai alat atau instrumen pendidikan itu sendiri.

Idealnya, suatu praktik pendidikan yang baik harus diikuti dengan praktik kurikulum yang baik. Mulanya, pendidikan membentuk individu menjadi insan yang memiliki kepribadian psotif. Kemudian, individu-individu tersebut menjadi suatu masyarakat yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan waktu yang lama dan kehati-hatian untuk menghasilkan suatu generasi dan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Ansyar, 2017). Kepercayaan dan

peran masyarakat untuk mendukung implementasi dan kesadaran terhadap pendidikan (Anggoro, 2017). Hal ini menitikberatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, begitu juga sebaliknya. Pendidikan yang bermanfaat bagi individu, bahkan suatu generasi untuk bisa hidup sejahtera dan aman berarti pendidikan yang bisa memberikan pengalaman dan dirasakan bermanfaat pada proses kehidupan yang dijalani. Hal ini juga memperkuat peran pendidikan, selain membekali individu dan masyarakat menjadi salah satu indikator untuk meneropong kemampuan atau tingkat keberhasilan negara, terutama pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sebagai tolok ukur yang relevan, pendidikan berkontribusi besar dalam kesejahteraan suatu masyarakat dan daerah. Istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal sebagai Human Development Indeks (HDI) merupakan suatu metode atau cara dalam mengukur suatu perbandingan harapan hidup, tingkat literasi atau melek huruf, kualitas pendidikan dan standar hidup untuk pada suatu negara. IPM bertujuan untuk mengklasifikasi atau mendeskripsikan tingkat sebuah negara apakah masuk dalam kategori negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, serta untuk mengukur penerapan kebijakan aspek ekonomi terhadap kualitas hidup yang diterima (Nurlitas, et. al, 2017). Dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur dua aspek utama: pertama, ratarata lama sekolah yang mengindikasikan jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, yang menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi dewasa; kedua, harapan lama sekolah yang mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan akan diikuti oleh anak-anak pada usia tertentu, biasanya usia masuk sekolah, yang mencerminkan investasi masa depan dalam pendidikan dan seberapa lama anak-anak diharapkan berada dalam sistem pendidikan.

Dimensi pendidikan sangat penting dikaji lebih dalam karena terkait langsung dengan peningkatan kualitas hidup, di mana pendidikan yang baik dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik,

meningkatkan pendapatan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup; pengurangan kemiskinan, karena pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan karena individu yang lebih terdidik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi; serta pembangunan ekonomi, karena pendidikan berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara melalui angkatan kerja yang terdidik yang lebih produktif dan inovatif, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020). Di sini terlihat jelas bahwa, pendidikan dan kurikulum seiring sejalan untuk menghasilkan satu generasi dan masyarakat, bahkan level makro suatu negara yang baik. Sehingga. kualitas masyarakat bisa dilihat dari kualitas pendidikan dan kurikulum, baik dari perencanaan, proses, dan hasil.

Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas tersebut? Akker (2010) menyebutkan kurikulum sebagai condicio sine qua non, artinya kehadiran yang mutlak pada sekolah, guru, dan masyarakat. Disini hadirnya guru adalah aktor utama dalam menciptakan proses belajar yang efektif, sesuai dengan kondisi yang dirasakannya. Dalam suatu desain pengembangan kurikulum, guru berperan aktif untuk mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk pembelajaran, dimana pembelajaran di kelas ini sebagai bagian dari kurikulum pada dimensi proses ditunjukkan melalui kontribusi guru mampu melaksanakan pembelajaran (Thoriq & Mahmudah, 2023). Peran guru sebagai garda terdepan tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi penerjemah dan pengembangan kurikulum dirasa kurang memiliki ruang untuk berkreasi. Sebagaimana yang diharapkan, guru harus menguasai hal-hal implementatif pendidikan dan kurikulum, baik dalam metode maupun pelaksanaan secara menyeluruh (Franciscus dkk, 2021). Tugas yang tidak mudah bagi guru di tengahtengah perubahan kurikulum harus beradaptasi dengan hal-hal baru. Maka, dibutuhkan suatu pemahaman atau kompetensi yang menyeluruh, mulai dari pengetahuan, sikap, hingga kemampuan. Tingkat kompetensi dan pemahaman guru

juga berpengaruh pada minat dan kompetensi, serta peningkatan prestasi siswa dalam belajar (Adi dkk, 2019; Dirgantoro, 2018; Putri dkk, 2019). Dengan demikian, kehadiran guru di kelas tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi pertimbangan kompetensi atau kinerja guru begitu penting dimiliki karena akan berkaitan langsung dengan capaian kompetensi para siswa.

Change in education is easy to propose, hard to implement, and extraordinarily difficult to sustain. Pernyataan Hargreaves dan Fink dalam Akker 2010 ini menggarisbawahi bagaimana perencanaan kurikulum diharapkan sesuai dengan implementasi. Sesuatu yang sulit membutuhkan solusi atau jalan keluar yang tepat. Namun, pada kenyataannya implementasi membutuhkan suatu usaha keras, agar mencapai tujuan yang diharapkan. Pada tahap ini, peran guru menjadi fondasi keberhasilan kurikulum. Namun, guru memiliki pemikiran, kepercayaan, bahkan pemahaman masing-masing dalam menerjemahkan inovasi kurikulum untuk disajikan dalam pembelajaran di kelas (White, 1997). Guru sebagai individu atau subyek memiliki emosi, keyakinan, dna hal-hal terkait internal yang sulit untuk dipahami secara formal. Hal inilah oleh Clandinin dan Connelly dalam Jackson (1992, hlm. 365) guru sebagai curriculum maker. Guru sebagai subyek dipandang tidak hanya sebagai implementer kurikulum, tetapi pengembang atau pencipta kurikulum itu sendiri. Kurikulum pada level makro disusun oleh para pengembangan kurikulum dan pemerintah yang telah ditunjuk sebelumnya. Sebagai suatu kebijakan, kurikulum tersebut diterima oleh guru, kemudian diterjemahkan menjadi kurikulum di kelas. Guru memiliki sesuatu yang melekat di dalam dirinya, seperti budaya, emosi, dan kepercayaan. Hal inilah yang mempengaruhi interpretasi kurikulum oleh para guru menjadi curriculum maker.

Keberhasilan guru pada kurikulum merupakan representasi dari keberhasilan pembelajaran secara konsisten hingga evaluasi yang baik (Amran, 2015). Sasaran dari kurikulum adalah manusia atau individu, yang nantinya mampu meneruskan generasi suatu bangsa. Guru diberikan beban besar untuk menyelesaikan administrasi, pelatihan untuk karier, dan aktivitas lain di luar sekolah (White, 1997,

hlm. 103 -117). Pandangan ini memosisikan guru sebagai obyek yang pasif untuk menerima berbagai intervensi sebagai bentuk perintah. Sebelumnya, eksistensi guru dalam implementasi kurikulum menjadi penentu keberhasilan kurikulum. Namun, pada kondisi ini, guru dihadapkan dengan berbagai aktivitas di luar pengajaran atau pembelajaran. "ada istilah kan merdeka untuk murid enggak merdeka buat perjanjian guru ya karena dibebani apa itu tuh administrasinya". Ini merupakan salah satu argumen yang disampaikan guru pada proses wawancara awal, bulan September 2024 yang menekankan bagaimana guru merasakan beban administrasi, sehingga mengganggu tugas utama sebagai pengajar atau pendidik, Guru dipenuhi dengan berbagai tugas administrasi sekolah, sehingga mengurangi perannya sebagai penerjemah kebijakan kurikulum, dengan segudang pekerjaan di luar pembelajaran. Tentu para guru kurang memiliki waktu untuk memikirkan secara penuh semangat menjadikan siswa-siswanya pintar dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Perlu dipahami bahwa Sebagian pihak masih melihat guru sebagai obyek yang wajib menjalankan segala perarturan, meskipun bertentangan dengan keyakinan diri.

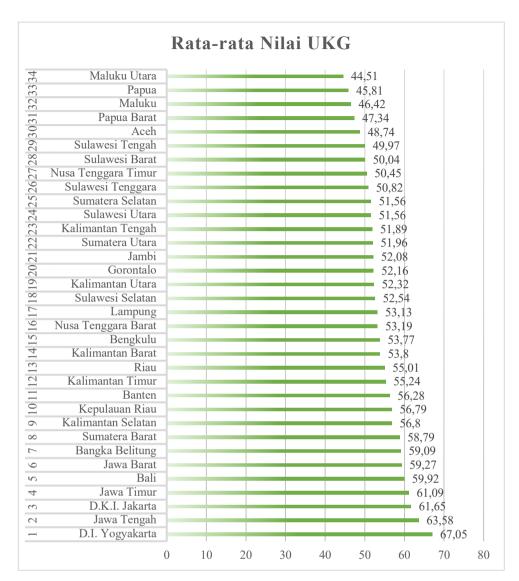
Sesuatu yang besar memiliki kontribusi besar dalam membawa perubahan, begitu juga dengan guru yang mampu membawa kurikulum menuju keberhasilan siswa. Guru harus mampu menerapkan segala ide pendidikan ke sekolah atau kelas masing-masing. Jumlah guru di Indonesia yang tinggi diharapkan sudah cukup dan mampu memfasilitasi sekolah dalam penerapan pendidikan, artinya tidak ada permasalahan pada kuantitas guru untuk memenuhi akses belajar siswa di sekolah.



Gambar 1.1 Peta Jumlah Guru Di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1, ditampilkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Semester Genap tahun ajaran 2022/2023, digambarkan bahwa persebaran jumlah guru di Indonesia di dominasi oleh guru sekolah dasar (SD) yang berjumlah 1.453.753. Sedangkan, guru sekolah menengah pertama (SMP) berada pada posisi dua dengan jumlah 669.248, diikuti guru sekolah menengah atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masing-masing berjumlah 336.427 dan 325.148 (Hilmiatussadiah dkk, 2024). Berdasarkan hal tersebut, besarnya jumlah guru SD bisa menjadi potensi atau peluang dalam mengembangkan dan memfasilitasi pendidikan dan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Jenjang pendidikan paling lama di Indonesia adalah sekolah dasar (SD). Pada fase ini, para guru memiliki kesempatan yang besar untuk menanamkan berbagai pengetahuan dan nilai yang berharga kepada siswa. Namun, hal tersebut bisa berbanding terbalik apabila guru-guru tidak memiliki pemahaman dan kesiapan secara mendalam terhadap pendidikan, baik itu kurikulum maupun pembelajaran secara khususnya (Petko dkk., 2018). Dengan demikian, eksistensi guru tidak hanya terdapat pada kehadiran di kelas menyampaikan materi, tetapi memiliki pemahaman dan kesiapan pada perubahan kurikulum. Sementara itu, terdapat suatu hal yang menarik, di mana Provinsi Jawa Barat. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023/2024 (link: https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/ptk/020000?jenis=pendidik) menjelaskan jumlah guru sekolah dasar terbanyak di Indonesia yaitu 200.269. Potensi ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kurikulum, apabila para guru memiliki kompetensi yang utuh.

Kuantitas harus seimbang dengan kualitas. Hal ini juga berlaku pada kuantitas guru diikuti dengan kemampuan guru yang baik. Nilai rata-rata ijian kompetensi guru (UKG) bertujuan untuk memberikan gambaran awal kemampuan guru. Meskipun, kemampuan guru yang sebenarnya lebih terlihat melalui kemampuan di kelas. Gambar 1.3, terlihat jelas bahwa rata-rata nilai UKG masih belum mencapai standar yaitu 70 (Hilmiatussadiah dkk, 2024; Indartiningsih, 2023). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berada pada posisi pertama, dimana hal ini dideskripsikan dengan rata-rata UKG 67,05. Sementara Jawa Tengah ada di posisi dua dengan rata-rata nilai UKG 63,58, dan Jakarta pada posisi ketiga dengan rata-rata UKG 61,65. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kompetensi guru-guru di Indonesia perlu ditingkatkan pada setiap daerah.



Gambar 1.2 Rata-rata Nilai UKG (Sumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022), dalam Hilmiatussadiah dkk, 2024)

Pada gambar 1.2, rata-rata nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di Jawa Barat berada di kisaran bawah, dengan nilai kurang dari 60. Meskipun nilai tepatnya tidak dapat diidentifikasi karena batang yang mewakili Jawa Barat terletak di antara skala 50 dan 60, informasi ini menunjukkan bahwa performa UKG di Jawa Barat berada di bawah beberapa provinsi lain yang mencapai nilai lebih tinggi. Misalnya, D.I. Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan nilai UKG yang signifikan lebih baik. Sebaliknya, Jawa Barat masih berada di atas beberapa provinsi lain yang

nilainya lebih rendah, seperti Maluku Utara yang memiliki nilai terendah pada grafik tersebut. Data ini mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam performa UKG antar provinsi, yang mencerminkan perbedaan dalam kualitas pendidikan dan kompetensi guru di berbagai daerah di Indonesia. Mengacu pada hal tersebut, masih terdapat disparitas antara standard atau kriteria yang diinginkan dengan kenyataan. Muncul pertanyaan, bagaimana kesiapan guru menghadapi perubahan kurikulum di Indonesia yang pasti akan terjadi? Hal ini yang membuat peneliti memutuskan dan tertarik untuk melakukan riset pada guru di Jawa Barat.

Guru sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam perubahan kurikulum, sulit mendapat ruang untuk berpendapat dan mengembangkan kreativitasnya untuk implementasi kurikulum. Pada istilah yang digunakan oleh Apple (2018), dalam tataran pendidikan perlu adanya komunikasi atau hubungan organik antara sekolah, guru, kurikulum, dan lingkungan, untuk membentuk suatu koneksi organik didalamnya. Argumentasi kritis yang dilakukan oleh Apple ini menjadi antitesis terhadap perlakuan atau kebijakan yang diberikan kepada guru. Guru hanya sebagai profesi yang mengikuti kebijakan dari atasan untuk menjalani perintah. Sebagaimana yang dimaksud dengan koneksi organik adalah hubungan internal antara seluruh komponen pendidikan, untuk dipahami bersama, disadari bersama, dan dilakukan bersama. Kurangnya hubungan ini juga yang diasumsikan sebagai satu permasalahan kurikulum di sekolah. Walaupun, permasalahan tersebut bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar (hidden). Hal ini pula yang menjadikan penelitian ini mengangkat cerita-cerita (narasi) guru, sebagai bagian dari perjalanan implementasi kurikulum, dengan tujuan mengetahui kegelisahan, permasalahan, keinginan atau harapan, dan strategi riil pelaksanaan kurikulum. Namun, dalam implementasi masih dirasa gagal. Ornstein dan Hunkins (2018), memperkuat pernyataan bahwa penyebab dari kegagalan implementasi pada ketidaksiapan guru sebagai pelaksana kurikulum, yang berkembang menjadi penolakan guru untuk melaksanakan kurikulum. Hal ini juga diperkuat bahwa guru belum memiliki pemahaman, penguasaan manajemen, dan kepercayaan diri atau keyakinan guru

terhadap kurikulum yang akan diimplementasikan, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap kemampuan diri (Nevenglosky dkk, 2019; Chimbi & Jita, 2019). Dengan demikian, peran guru adalah menjadi penentu keberhasilan suatu kurikulum, sehingga perlu ada kesadaran dan *acceptance* (penerimaan yang utuh) dari guru terhadap perubahan kurikulum. Memahami guru sebagai subyek artinya bukan memosisikan guru sebagai sumber permasalahan kurikulum, melainkan mengubah sudut pandang guru sebagai individu yang humanis dansebagai individu yang aktif bukan pasif.

Sebelum memahami konsep perubahan kurikulum dan guru, perlu dilihat terlebih dahulu perubahan kurikulum di Indonesia sebagai suatu fenomena yang tidak terhindarlan pada pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, perubahan kurikulum merupakan bagian dari inovasi atau kurikulum baru. Perubahan tersebut dimulai dari awal kemerdekaan Indonesia, hingga saat ini, dengan adanya Kurikulum Merdeka. Sejarah dinamis pada pergantian kurikulum di Indonesia, dimulai dari penjajahan Belanda pada tahun 1830-an, pendudukan Jepang tahun 1940-an, dan setelah kemerdekaan tahun 1945. Pada tahun 1947 dimulai dengan kurikulum yang dipercayai sebagai kurikulum asli Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada pengaruh dari Belanda dan Jepang pada waktu itu. Selanjutnya kurikulum tahun 1952, 1964, dan 1968 (Febriyenti dkk., 2023; Insani, 2019) yang mendasarkan pada Pancasila. Pada tahun 1975 mulai menekankan pada sistem dan pendekatan-pendekatan psikologi dan pembelajaran. Kemudian dikenal dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) pada tahun 1984, dimana fokus pada model ini adalah siswa. Kemudian tahun 1994, sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya, yang lebih dikenal dengan sistem caturwulan. Selanjutnya perubahan tersebut dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, dan Kurikulum 2013. Hingga saat ini kurikulum yang diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yaitu kurikulum merdeka (Iramdan & Manurung, 2019). Pergantian tersebut diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat dan

pemecahan masalah secara global, nasional, hingga lingkup sekolah. Perubahan kurikulum merupakan suatu keniscayaan dalam perkembangan pendidikan (Nasution, 1999). Menurut Nasution (1999) perubahan kurikulum atau penyempurnaan kurikulum merupakan suatu keniscayaan yang dilakukan sesuai perkembangan zaman. Suatu kurikulum dirancang untuk membuat suatu perubahan, baik proses maupun hasil dari desain kurikulum. Oleh karena itu, perubahan harus mengarah pada suatu perbaikan.

Perubahan kurikulum di Indonesia terus berganti membuktikan satu usaha serius pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan beradaptasi dengan perkembangan jaman. Namun, pergantian atau perubahan kurikulum tersebut tetap memberikan masalah dan kegagalan dalam pendidikan (Poedjiastutie dkk., 2018). Ansyar (2017) menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam program pendidikan adalah belum adanya keselarasan antara perencanaan dan implementasi. Dimensi proses atau implementasi berkaitan dengan peran guru menerjemahkan dan menerapkan kurikulum secara aktual di kelas. Maka, peran guru sangat dibutuhkan untuk membawa tujuan-tujuan tersebut menjadi nyata ke bentuk pembelajaran. Tentu hal ini tidak akan mundah, mengingat peran aktif guru sebagai agen perubahan menjadi berbeda. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi pelaksana, penerjemah, dan perancang kurikulum di kelas (Clandinin & Connelly, 1990). Namun, padangan ini berbeda dengan apa yang seharusnya dimana guru masih dianggap sebagai objek atau pelaksana kurikulum dari pemerintah, seperti menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan pembuat rencana pembelajaran. Kondisi membutuhkan kontribusi guru yang lebih otonom dalam mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum menjadi pembelajaran di kelas (Clandinin, 2006).

Perubahan kurikulum membutuhkan keberhasilan implementasi atau penerapan kurikulum. Keberhasilan implementasi suatu program terjadi melalui perencanaan yang serius. Proses perubahan menuntut perencanaan, tetapi perencanaan yang fleksibel untuk mengatasi keadaan dan peristiwa yang tidak

diinginkan (Ornstein & Hunkins, 2018). Ketika peristiwa muncul, prosedur harus dirancang dan disesuaikan dengan baik Namun, masih terjadi permasalahan dalam implementasi kurikulum yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak ditemui kegagalan dan masalah dalam kurikulum yang terstruktur tersebut. Permasalahan tersebut terdapat pada kebijakan pemerintah, permasalahan implementasi di sekolah, pelaksanaan di kelas dan kompetensi atau pemahaman guru terhadap kurikulum (Adriantoni & Fitrianis, 2019; Djaelani, 2019; Slameto, 2015). Dengan demikian, kegagalan pada kurikulum masih masif ditemukan di sekolah-sekolah, walaupun sudah melalui skema yang terukur dan sistematis. Suatu pendidikan yang sukses tidak terlepas dari kualitas kurikulum yang direncanakan. Kurikulum mengambil peran penting, sebagai jantung pendidikan (heart of education). Melihat bahkan memahami secara mendalam mengenai keberhasilan pendidikan, sering kali hanya dilihat pada salah satu saja. Oleh Ki Hajar Dewantara, memberikan konsep manusia merdeka adalah selamat raganya dan bahagia jiwanya. Namun, manusia tidak menjadi merdeka terhadap apa yang ingin dipilih (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013). Begitu pula dengan sosok guru yang merupakan manusia, yang memiliki satu kesadaran atau hal di dalam dirinya yang mempengaruhi cara mereka berperilaku.

Guru dan perubahan kurikulum menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti, karena ketika melihat guru sebagai subyek, ada beberapa hal yang tersembunyi untuk bisa dipahami lebih dalam dan berkontribusi pada dimensi proses suatu kurikulum.

"kita aja dulu kasih yang terbaik, semaksimal mungkin, adapun nanti hasilnya akan kita aja berusaha aja, kita hasilnya itu serahkan kepada yang di atas ... padat tapi Alhamdulillah barokah... Kalau mengenai rezeki Alhamdulillah; sudah selesai pensiun kan juga enggak apa-apa untuk menambah itu ya; beban buat ibu kalau tidak ada yang gak bisa baca apalagi yang masih gak bisa huruf itu bebannya"

Kutipan di atas merupakan sedikit cerita seorang guru honorer yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun di satu sekolah dasar di Jawa Barat. Cerita ini dikisahkan oleh seorang guru melalui sebuah wawancara pada tanggal 1 Oktober 2024 di salah satu

SD di Kota Tasikmalaya. Perjalanan 20 tahun bukan waktu yang sebentar bisa menjalani berbagai pergantian kurikulum. Kisah-kisah guru lain akan lebih dalam disajikan dan dibahas pada bab temuan dan pembahasan. Perlu usaha sadar bagi seorang orang berada di posisi tersebut, dengan kekurangan pada pendapatan guru, tetapi tetap dituntut untuk maksimal dalam pekerjaan. Cerita guru tersebut menginterpretasikan sebuah bentuk akseptabilitas atau penerimaan dalam perubahan kurikulum, dimana guru tersebut menyerahkan hasil dari usaha dan pengorbanan yang sudah dilakukan. Bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, karena pada posisi ini guru tersebut mampu bertahan dan menunjukkan kinerja yang setara dengan guru lain yang lebih muda atau lebih memiliki penghasilan. Dengan demikan, perubahan kurikulum menghasilkan suatu kisah dari guru-guru yang menarik untuk diteliti dan berkontribusi pada pengembangan kurikulum. Sekhon dkk (2017) menyebutkan akseptabilitas atau penerimaan sebagai respon dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan kemampuan dalam suatu intervensi.

Perubahan kurikulum bagi beberapa ahli membentuk suatu pola. Siklus perubahan kurikulum tetap bertitik tolak pada tujuan, isi, proses, dan evaluasi (Ansyar, 2017). Sosok guru dan kurikulum tidak bisa dipisahkan, ibarat satu sistem yang kehadirannya sangat dibutuhkan, terutama dalam proses kurikulum. Bergantinya kurikulum harus diikuti dengan perubahan individu dan seluruh bidang kehidupan, terutama pada perubahan pada guru secara utuh, mulai dari sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Menurut Nasution (1999) suatu perubahan pada individu secara umum melalui tiga fase, yaitu fase inisiasi, legitimasi, dan kongruensi. Fase inisiasi berarti permulaan suatu ide perubahan dikenalkan sifat, tujuan, dan seberapa besar perubahan ingin dicapai. Fase legitimasi berarti penerimaan seseorang terhadap perubahan. Fase kongruensi berarti seseorang menerima dan mengadopsi psrubahan itu dalam dirinya, sebagai bagian dalam dirinya. Dengan demikian, proses penerimaan terhadap suatu perubahan membutuhkan waktu yang lama, karena memerlukan penerimaan, hingga terinternalisasi dalam diri guru. Bagaimana dengan perubahan kurikulum yang

terjadi dan dirasakan oleh para guru? Tentu saja memerlukan proses-proses penerimaan hingga adopsi diri, bahwa perubahan kurikulum tersebut.

Suatu perubahan atau inovasi kurikulum tidak lepas dengan isu penerimaan kurikulum yang akan diadopsi (Ornstein & Hunkins, 2018). Perubahan kurikulum dirasa sulit oleh beberapa guru, terutama dalam memahami kurikulum baru yang diterapkan. Dimana hal ini bisa berpengaruh pada kualitas implementasi atau proses di sekolah dan kelas, seperti penyusunan rencana pembelajaran, strategi pemanfaatan media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang dipilih. (Ani dkk, 2020; Musa & Rahmawati, 2022; Prehanto & Nuryadin, 2023). Akseptabilitas guru ditandai dengan adaptasi pola pikir untuk berkembang dari pergantian kurikulum sebelumnya (Huang, 2023). Akseptabilitas guru merupakan bagian diri atau internal guru. Penerimaan tersebut bisa berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan sistem sebelumnya dan pengalaman-pengalaman guru sebelum inovasi dilakukan (Fonger, 2021; Wong dkk, 2021). Guru yang tidak paham dengan kurikulum baru tidak akan memiliki rasa percaya diri terhadap implementasinya. Hal ini berarti perubahan kurikulum membutuhkan kesiapan guru dalam menghadapi hal tersebut. Kondisi berakibat pada kegagalan implementasi kurikulum dan perbaikan dalam perubahan kurikulum. Apabila hal ini terjadi terus menerus, maka kegagalan pada implementasi terjadi secara berulang-ulang dan tidak menemui jalan keluar. Implementasi yang baik terjadi ketika guru-guru mampu menjalankan pembelajaran yang baik.

Proses yang baik akan mempengaruhi hasil atau tujuan kurikulum yang diharapkan. Begitupula seorang guru SD yang paham dan siap pada perubahan kurikulum akan berpengaruh pada interpretasi dan penerapan kurikulum di kelas (Deswina dkk., 2023; Efendy; 2015; Peskova dkk., 2023). Guru yang memiliki akseptabilitas atau penerimaan berarti berhubungan dengan persepsi, kepercayaan, dan ekspektasi guru terhadap perubahan yang terjadi (Gonsiewski (2014). Penerimaan guru diasumsikan berperan dalam implementasikan kurikulum karena berhubungan dengan kesiapan dan pemahaman guru. Penerimaan guru bentuknya

sulit dijelaskan melalui perilaku yang muncul. Penerimaan bisa tidak sesuai dengan benar-benar diyakini. Oleh sebab itu, penerimaan berkaitan dengan nilai-nilai atau kepercayaan yang diyakini guru. Tidaklah mudah mengubah persepsi atau penerimaan guru pada kurikulum yang baru, karena berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut (Gonsiewski, 2014). Riset mengenai penerimaan guru sekolah dasar (SD) masih terbatas, terutama detail atau aspek yang membangun penerimaan guru tersebut dihubungkan dengan kurikulum. Maka, perlu ada riset mengenai penerimaan guru yang detail dan bisa mengukur hal nyata dialami dan dirasakan seorang guru, karena penerimaan tersebut bisa berpengaruh pada penerapan kurikulum di kelas, apabila hal-hal tersebut diabaikan.

Ditengah-tengah harapan pada guru berhasil dalam pembelajaran yang diharapkan, muncul permasalahan yang diakui terjadi pada guru, pemerintah, atau kurikulum yang dirancang. Pada tataran guru, didapatkan beberapa hal yang mempengaruhi ketidakmampuan guru dalam memahami kurikulum, diantaranya persepsi terhadap kurikulum, latar belakang pendidikan, pengalaman, motivasi, manajemen, dan lingkungan kerja. Sementara itu, masalah pada pemerintah, diyakini pada kemampuan pemerintah dalam menentukan strategi implementasi dan kebijakan yang diterapkan (Prehanto & Nuryadin, 2023). Pelatihan kurikulum seharusnya tidak sebatas pada skill atau pengetahuan, tetapi harus menyentuh moral atau karakter guru, sesuai dengan karakteristik guru sebagai insan dewasa (Tuncel & Çobanoğlu, 2018; Yemini dkk, 2019). Bahkan persiapan sebelum pelatihan menjadi salah satu rencana baik dalam menyiapkan guru pada suatu inovasi kurikulum. Maka, pelatihan kurikulum seharusnya tidak hanya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan guru, tetapi perlu menyentuh kesadaran dan moral guru secara menyeluruh. Proses deliberasi pada pengembangan kurikulum menjadi salah satu kunci keberhasil pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2018, hlm. 218-219).

Pelatihan-pelatihan guru diharapkan bisa meningkatkan kesiapan dan pemahaman guru. Tentu saja berbagai pendekatan dan metode yang diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan guru. Pada perencanaan kurikulum, pelatihan-

pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru mengetahui secara mendalam konsep suatu kurikulum yang dirancang. Pelatihan pada program dirancang sebagai bentuk persiapan pada suatu inovasi yang akan diterapkan untuk membentuk kesiapan guru (Canals & Al-Rawashdeh, 2019). Namun, pada kenyataannya guru masih belum memahami kurikulum yang diimplementasikan, yang berpengaruh pada strategi atau implementasi yang dilakukan guru di sekolah masing-masing (Angga dkk, 2021; Sutjipto, 2016). Dengan demikian, masih ditemukan terdapat permasalahan-permasalahan yang diyakini mempengaruhi pemahaman guru terhadap suatu kurikulum, meskipun sudah dilakukan pelatihan untuk guru.

Pelatihan guru yang sesuai tidak hanya menyasar pada ranah kognitif atau kemampuan berpikir atau keterampilan guru saja. Guru adalah manusia yang memiliki sifat, kemampuan, dan hal psikis yang mempengaruhinya. Guru berperan menyelaraskan antar apa yang direncanakan dengan kondisi faktual di sekolah. Apapun perubahan kurikulum secara makro, tanpa diikuti implementasi guru, yang tepat ibarat berlari pada posisi yang sama. Seharusnya, guru memiliki ide masingmasing yang berpengaruh pada strategi atau implementasi kurikulum di sekolah atau kelas (Giroux dkk, 198; Schubert, 1986). Namun, terdapat suatu pemahaman awal yang perlu dikoreksi bahwa, implementasi kurikulum bukan sekedar mengaktualisasikan rencana atau pedoman kurikulum ke dalam kelas oleh para guru. Implementasi kurikulum, terutama ketika mengadopsi kurikulum baru, berarti perlu adanya adaptasi pada pemahaman, persepsi, sikap, ideologi atau filosofi, nilai, dan segala hal (termasuk di dalamnya *Hidden curriculum*) guru (Ansyar, 2017). Namun, pada implementasi kurikulum, terutama suatu kurikulum baru terdapat penerimaan dan penolakan yang dialami oleh seorang guru (Miller & Seller, 1985, hlm. 235; Nasution, 1999). Maka, di sini terlihat bahwa guru tidak hanya sebagai objek pada perubahan kurikulum, tetapi harus dipandang sebagai subyek yang memiliki otonomi dalam pembelajaran dan memiliki konsep sendiri yang tidak bisa diabaikan.

Guru sebagai pelaksana kurikulum memiliki ide atau konsep kurikulumnya sendiri. Para pendidik ini memiliki suara yang juga harus didengarkan dan bermakna (Jack-Malik, 2018). Hal ini yang dilupakan oleh para pengembang kurikulum atau penyusun kebijakan kurikulum nasional dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan perasaan dan penerimaan pendidik. Guru sebagai kunci utama dalam keterlaksanaan kurikulum sering kali diibaratkan sebagai pelaksana yang pasif, yang hanya bisa mematuhi kebijakan dan melaksanakan sesuai pedoman tanpa ada kreativitas dan penyesuaian. Segala bentuk perubahan kurikulum berpengaruh perubahan pola pikir dan perilaku guru. Strategi implementasi kurikulum dari guru satu dengan yang lain pasti berbeda, karena hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal dalam dirinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kurikulum, perlu melihat guru sebagai makhluk hidup yang memiliki jiwa, perasaan, dan pemikiran (Nasution, 1999). Pengaruh latar belakang keluarga, ras, pendidikan, dan motivasi merupakan hal yang nantinya mempengaruhi metode yang digunakan (Weran & Kuswandono, 2021; Arvaja, 2016; Noonan, 2019). Mengacu pada hal tersebut, riset kurikulum perlu memahami secara mendalam apa yang tidak terlihat (hidden curriculum) atau bahkan tidak disadari oleh para guru. Nantinya, hasil tersebut bisa menjadi sumbangsih pada proses perancangan dan pengembangan kurikulum. Maka diperlukan suatu studi atau investigasi untuk memahami guru sebagai bagian dari proses subjektif perjalanan penerimaan atau tidak dari suatu perubahan kurikulum.

Seringkali cerita guru dianggap tidak memiliki makna dan kontribusi pada pengembangan dan implementasi kurikulum. Perubahan kurikulum membutuhkan moral acceptance, karena penolakan guru akan menjadi masalah atau kendala dalam proses implementasi. Dengan demikian, akseptabilitas guru tidak hanya wujud kepatuhan dalam menjalankan sistem, akan tetapi perlu dipahami juga penerimaan sebenarnya dari guru pada sistem baru tersebut. Hal ini cukup beralasan, dimana guru sebagai pelaksana atau penentu dari ketercapaian kurikulum, perlu dipahami secara menyeluruh, tidak hanya perilaku yang

ditunjukkan dalam menjalankan suatu kebijakan, akan tetapi keinginan dan motivasi menerima inovasi secara positif (Nawastheen dkk, 2013).

Sedikit penelitian yang mengangkat atau menggali cerita-cerita guru sebagai bagian dari penelitian kurikulum, untuk dijadikan suatu rekomendasi dalam perencanaan kurikulum (Ropo & Yrjänäinen, 2020). Memahami kurikulum melalui kisah-kisah berarti memahami kurikulum tidak hanya sebagai dokumen yang diterapkan pada sekolah. Living curriculum (kurikulum yang hidup) berarti menggali keseluruhan cerita atau pengalaman berbagai pihak untuk menyampaikan seluruh hal yang dialami dan dipikirkan (Clandinin & Connelly, 1990; Parker dkk, 2011). Bagi guru, kurikulum menjadi bagian dalam dirinya sebagai bentuk integritas. Kurikulum hidup dalam diri guru, dimana tidak hanya kurikulum akan hidup dalam kelas atau sekolah saja, tetapi di luar itu pun guru melakukan aktivitasnya akan dipengaruhi oleh kurikulum. Sebagai contoh, seorang polisi yang menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai seorang aparat, bahkan di luar jam kerjanya mereka akan tetap menjalankan tugasnya memberikan keamanan kepada masyarakat. Begitu pula guru akan tetap dipengaruhi kurikulum dalam berdiskusi dan memberikan pendapatnya tentang kurikulum, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui pengalaman tersebut hanya dapat diketahui dengan narasi atau cerita pelaku pendidikan, sebagaimana dalam bidang kurikulum, cerita pelaku pendidikan selama menjalani pekerjaan baik itu menerapkan kurikulum di kelas, mempelajari kurikulum, dan aktivitas lain (Clandinin, 2006).

Perubahan kurikulum memberikan berbagai cerita menarik dari guru, mulai cara guru bertahan pada kesulitan-kesulitan hingga bagaimana guru bisa menyeimbangkan antara menjadi profesional dalam pekerjaan dengan kebutuhan personal. Penelitian narasi bisa mengetahui identitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dimana sekolah tidak selalu melakukan pilihan rasional berdasarkan tujuan dan pertimbangan lain sering muncul, seperti kebiasaan institusional dan birokrasi, sistemik logik, jadwal guru, atau cara-cara tradisional dalam mengatur

kelas dan pendistribusian sumber daya (Ropo, 2019). Pada penelitian ini, narasi diterapkan sebagai salah satu cara untuk menyederhanakan kompleksitas, untuk menyajikan fenomena yang sulit ditafsirkan dengan penjelasan yang dapat dimengerti mengambil yang penting yaitu alur ceritanya, tetapi sering meninggalkan detailnya (Ropo, 2019). Naratif sendiri berasal dari bahasa Latin narre, yang berarti menyampaikan atau memberitahu suatu peristiwa. Namun, belum semua peristiwa bisa dimasukkan sebagai narasi, dimana terdapat beberapa hal detail yang menjadi ketentuan narasi. Ketentuan tersebut seperti dibentuk dari beberapa rangkaian peristiwa yang saling terhubung dan membentuk suatu makna (Eriyanto, 2013). Di bidang pendidikan, metode naratif menjadi salah satu metode yang tepat untuk mengetahui pemahaman secara mendalam pemikiran guru sebagai pelaksana, tidak bisa dilakukan hanya pada waktu yang singkat. Proses ini memerlukan kajian mendalam, dengan menggali berbagai informasi atau pengalaman hidup guru, terutama dalam menjalani dan melewati berbagai proses perubahan kurikulum tersebut. Sama seperti halnya dengan berbagai metode penelitian lain, penggalian informasi melalui narasi, akan diketahui berbagai informasi bagaimana para guru di satuan pendidikan dasar beradaptasi atau menggunakan berbagai cara untuk memahami suatu konsep kurikulum. Dapat dipahami bahwa, metode narasi bisa membantu penggalian konsep kurikulum guru, bahkan sampai pada pembentukan identitas seorang pengajar.

Beberapa penelitian terkait narasi dan kurikulum cukup banyak digunakan pada subjek atau area penelitian di sekolah, dengan guru, siswa, dan keluarga sebagai subjek penelitian. Disamping itu, beberapa topik terkait mengenai perjalanan atau pengalaman guru dalam mengajar, penggalian perasaan atau halhal yang tidak eksplisit muncul dalam perilaku seperti nilai, *personality*, identitas, dan kepercayaan guru, serta terkait dengan kritik pada suatu kebijakan pendidikan dan kurikulum. Hal ini relevan dengan penelitian Ropo (2019), Ladson-Billings (2016) dan Conle (1999), dimana kurikulum dipahami sebagai representasi simbolik dari suatu realitas yang ada, termasuk di dalamnya identitas dan nilai.

Lebih lagi, lingkungan sekolah, kebijakan, pembelajaran, dan kurikulum dapat mempengaruhi pembentukan suatu identitas guru dan ekspektasi terhadap konsep atau falsafah pendidikan yang dianut (Ropo, 2019). Dengan demikian, penelitian naratif sesuai diterapkan pada subjek penelitian di sekolah atau kelas, melalui penggalian cerita dan pengalaman responden selama menjalani aktivitas dan peranya.

Pentingnya studi ini dilakukan adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam pengalaman guru selama perubahan kurikulum. Menurut Ropo (2019) meskipun naratif kurikulum masih diabaikan, ada beberapa rekomendasi dalam perumusan antara lain: naratif sebagai konsep kurikulum, naratif sebagai hakikat ilmu pengetahuan, naratif sebagai muatan pelajaran, naratif sebagai hakikat pembelajaran dan cara membangun pengetahuan, dan naratif sebagai representasi dari identitas. Apakah terlihat pengembangan kurikulum dalam perspektif naratif? Jawabannya tentu saja ada. Pada studi naratif, seperti yang dinyatakan oleh Eero, dimana para guru telah melalui perjalanan-perjalanan dalam proses adaptasi perubahan kurikulum. Diharapkan, melalui narasi pemerolehan, pengolahan, dan aktualisasi komponen tersebut bisa dianalisis secara mendalam dan kebebasan dari narasumber. Dalam proses adaptasi tersebut, melibatkan adaptasi guru dalam memahami ide atau konsep kurikulum, konten atau pengetahuan yang akan diajarkan, strategi kurikulum, dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengungkap pengalaman guru selama perubahan kurikulum di Indonesia, dimana setiap guru, sebagai manusia yang eksistensinya perlu dimaknai dan dikaji secara mendalam. Pernyataan ini berangkat dari dugaan untuk memaknai pengalaman guru tidak hanya dilakukan melalui angka dan generalisir, tetapi pemaknaan mendalam bagaimana aksetabilitas guru terhadap perubahan kurikulum bisa terbentuk, kajian yang melibatkan bidang ilmu lain, dan pengetahuan peneliti yang menghubungkan antara pemahaman responden dengan makna dari pengalamannya. Namun, perlu dilakukan pemaknaan dari hal tersembunyi guru untuk menghasilkan

sebuah rekomendasi praksis dan filosofis dalam implementasi kurikulum. Melalui penelitian ini diharapkan akan menghasilkan kerangka kerja kurikulum, sebagai acuan pelaksanaan kurikulum untuk guru dan temuan teori implementasi kurikulum

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus, yang dijabarkan sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Umum

Bagaimana akseptabilitas guru sekolah dasar terhadap perubahan kurikulum?

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus

Adapun rumusan masalah khusus terdiri dari beberapa pertanyaan berikut:

- Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek perilaku terhadap perubahan kurikulum?
- 2) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek beban atau kesulitan terhadap perubahan kurikulum?
- 3) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek etika terhadap perubahan kurikulum?
- 4) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek koherensi efektivitas terhadap perubahan kurikulum?
- 5) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek koherensi intervensi terhadap perubahan kurikulum?
- 6) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek keuntungan atau peluang terhadap perubahan kurikulum?
- 7) Bagaimana akseptabilitas guru pada aspek efikasi diri terhadap perubahan kurikulum?
- 8) Bagaimana keterkaitan status pekerjaan, status profesional, jenis kurikulum yang diterapkan, dan lama kerja terhadap akseptabilitas guru terhadap perubahan kurikulum?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

22

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan konsep akseptabilitas guru terhadap perubahan kurikulum

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan penelitian khusus pada bagian ini antara lain:

- Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek perilaku terhadap perubahan kurikulum
- 2) Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek beban atau kesulitan terhadap perubahan kurikulum
- Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek etika terhadap perubahan kurikulum
- 4) Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek koherensi efektivitas terhadap perubahan kurikulum
- 5) Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek koherensi intervensi terhadap perubahan kurikulum
- 6) Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek keuntungan atau peluang terhadap perubahan kurikulum
- 7) Menganalisis akseptabilitas guru pada aspek efikasi diri terhadap perubahan kurikulum
- 8) Menganalisis keterkaitan status pekerjaan, status profesional, jenis kurikulum yang diterapkan, dan lama kerja terhadap akseptabilitas guru terhadap perubahan kurikulum

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat untuk pendidikan dan kurikulum, baik secara teoritis maupun praktis, dimaksudkan meningkatkan kualitas pendidikan dan kurikulum baik bagi siswa, guru, ataupun pihak-pihak terkait implementasi, pengembangan, dan perencanaan kurikulum. Melalui tahap pengujian keabsahan data dan verifikasi di lapangan, penelitian penerimaan guru terhadap perubahan kurikulum memiliki manfaat teoritis yang diharapkan untuk dicapai adalah penelitian ini berkontribusi dalam penguatan ilmu pengetahuan

melalui temuan teori penerimaan guru pada perubahan kurikulum pendidikan, yang erat kaitannya dengan penentuan kualitas hasil pendidikan. Hasil ini juga diharapkan bermanfaat sebagai fondasi teori kurikulum, secara khususnya berkaitan dengan persiapan implementasi kurikulum.

Di samping dihasilkan manfaat teoritis, diharapkan manfaat praktis yang untuk dicapai adalah dihasilkan kerangka kerja kurikulum yang bermanfaat menjadi acuan dalam mensosialisasikan kurikulum baru, melalui telaah pemahaman dan penerimaan guru. Selain itu, bagi pengembang program kompetensi guru terhadap kurikulum, konsep penerimaan akan berkontribusi dalam menjadi dasar untuk merencakan implementasi kurikulum, secara khususnya menyusun strategi implementasi kurikulum kepada guru dengan melihat kondisi guru untuk menyusun kebijakan kurikulum baru yang diterapkan.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Bagian ini memuat struktur sistematika penulisan disertasi dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu Latar Belakang yang berisi deskripsi mengenai alasan atau dasar yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, Rumusan Masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, yang dibagi menjadi dua, yaitu Rumusan Masalah Umum dan Rumusan Masalah Khusus. Bagian berikutnya adalah Tujuan Penelitian yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah umum dan khusus. Tujuan berisi jawaban-jawaban yang ada pada rumusan masalah, baik yang umum maupun yang khusus. Selanjutnya, Struktur Organisasi menyajikan sistematika penulisan penelitian disertasi dan memberikan ringkasan dari setiap bab yang akan dibahas.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, Kajian atau Kerangka Teoritis yang terdiri atas hasil analisis penelitian terhadap teori-teori yang relevan. Kedua, Tinjauan Pustaka yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, seperti teori kurikulum dan pembelajaran, *narrative inquiry*,

serta karakteristik guru SD. Ketiga, Penelitian Terdahulu yang menawarkan ulasan ringkas mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan atau memiliki topik yang sama, kemudian dijelaskan posisi penelitian ini. Bagian-bagian dalam bab ini akan menjadi landasan atau acuan untuk bab-bab selanjutnya.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini mencakup beberapa hal dalam proses pengambilan data hingga analisis data. Bagian ini terdiri dari deskripsi Desain dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Partisipan, Populasi dan Sampel, Penyusunan dan Validitas Instrumen Penelitian, Prosedur Penelitian, serta Teknik dan Analisis Data. Pada Desain Penelitian menjelaskan pendekatan dan metode yang dipilih oleh peneliti. Partisipan merupakan pihak-pihak atau orang-orang yang berkontribusi dalam penelitian. Populasi dan Sampel merujuk pada jumlah data dari berbagai pihak yang informasinya akan dianalisis, disertai dengan teknik pemilihan sampel. Instrumen Penelitian menjelaskan alat atau teknik pengumpulan data, terdiri dari instrumen penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, bagian ini dilengkapi dengan tahap uji validitas dan reliabilitas data.

BAB IV Hasil Penelitian. Pada Bab ini berisi Deskripsi Hasil dan Temuan. Deskripsi hasil berisi penjabaran komprehensif detail data yang didapatkan pada penelitian. Sementara Temuan Penelitian berisi hal-hal apa saja yang menjadi perhatian dalam penelitian Temuan penelitian merupakan hasil yang didapatkan dari analisis data yang terkumpul selama proses penelitian. Bagian ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian serta tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V Pembahasan. Bagian ini bertujuan untuk menafsirkan temuan penelitian, menjelaskan arti dari hasil yang diperoleh, dan membandingkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Bagian pembahasan berisi analisis mendalam dari peneliti terhadap hasil dan temuan penelitian, menghubungkannya dengan berbagai aspek untuk mengidentifikasi perbedaan dan ciri khas temuan penelitian. Pembahasan penelitian berisi kajian atau analisis peneliti terhadap hasil dan temuan

yang didapatkan, kemudian dihubungkan dengan berbagai hal, untuk menemukan pembeda dan karakteristik temuan penelitian.

BAB VI Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab terakhir ini menyajikan ringkasan hasil analisis data dari temuan penelitian yang telah diperoleh. Simpulan juga berisi jawaban-jawaban dari permasalahan penelitian. Bagian rekomendasi berisi pendapat penulis yang ditujukan bagi pembaca atau pihak terkait, yang bisa dihubungkan dengan temuan atau hasil penelitian.